



Judul : Parlemen Kekerabatan
Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

T A J U K R E N C A N A

Parlemen Kekerabatan



Sejumlah parpol mengajukan nama bakal calon anggota legislatif untuk Pemilu 14 Februari 2024. Selain politisi dan pesohor, ada juga kerabat pimpinan parpol.

Harian *Kompas* 16 Mei 2023 menulis berita dengan judul "Karpas Merah untuk Kerabat." Dilaporkan sejumlah kerabat pimpinan partai politik diajukan sebagai bakal caleg. Ada nama Pinka Hapsari (putri Ketua PDI-P Puan Maharani), Atalia Kamil (istri Wakil Ketua Umum Golkar Ridwan Kamil), Yane Ardian (istri Ketua DPP PAN Bima Arya), Putri Zulkifli Hasan (putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan), Titiek Prabowo (mantan istri Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto). Ada pula nama Yusril Kemal Fadlulah (putra Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra).

Selain kerabat pimpinan parpol, sejumlah menteri dan pesohor juga mewarnai wajah bakal caleg Pemilu 2024. Tidak ada yang salah dengan perekrutan politik model demikian. Menjadi hak setiap orang untuk menjadi caleg. Namun, publik berharap pula caleg menyuarakan kepentingan rakyat yang telah mengantarkan mereka ke parlemen.

Dari sejumlah jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei, DPR memiliki tingkat kepercayaan publik paling rendah daripada lembaga negara lain. Para caleg harus menyadari bahwa jika terpilih, mereka adalah *elected office*, yang dipilih rakyat, yang dibayar dari pajak rakyat, untuk berbicara, dan terus berbicara.

Pekerjaan Dewan adalah *parle* atau berbicara. Berbicara sebagai anggota DPR di DPR bukanlah sekadar berbicara di seminar. Berbicara di Dewan adalah *the exertion of power*, mengerjakan kekuasaan, mengolah kekuasaan untuk mencapai tujuan. Tidak bisa dimengerti jika anggota DPR tak pernah berbicara mengolah kekuasaan atau hanya tunduk pada ketua umum parpol.

Daniel Dhakidae menyebut, kuasa wicara (*the power of speech*) memperjuangkan kepentingan rakyat adalah esensi dari DPR. Karena itulah, menjadi anggota DPR haruslah mempunyai *compassion* terhadap apa yang dirasakan rakyat, memiliki sensitivitas politik, dan punya kemampuan teknis.

Kekecewaan rakyat kepada DPR tecermin dari sejumlah lembaga survei. Contoh mutakhir adalah kisruh jalan rusak di Lampung yang viral setelah seorang *tiktoker* melemparkannya ke publik. Pertanyaannya, mana suara anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung? Mana suara anggota DPRD Provinsi Lampung? Mana anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau Senator Lampung. Mengapa mereka diam saja?

Situasi itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Publik berharap anggota DPR pesohor bisa mengolah kekuasaan dengan kuasa wicara mereka untuk menyuarakan jeritan rakyat. Rakyat yang miskin karena banyaknya korupsi, menyuarakan kehancuran ekologis karena ketamakan elite yang tak memperhatikan keadilan lintas generasi, meniadakan kesenjangan sosial yang kian menganga antara yang kaya dan yang miskin.

Semoga kerabat serta pesohor tidak mengecewakan. Saatnya mereka menyampaikan gagasan, bukan hanya mengandalkan popularitas.